

CORPORATE GOVERNANCE, WHISTLE BLOWING POLICY DAN EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN JASA DI INDONESIA

Dian Indriana Hapsari*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro
email: dian.indriana@yahoo.com

ABSTRACT

Corporate Governance mechanisms are not able to effectively mitigate Earnings Management. Whistleblowing Policy can play a role in carrying out effective functional governance so that it is expected to be able to reduce Earnings Management activities significantly. This study aims to examine whether the corporate governance mechanism in a company that implements Whistleblowing Policy is more effective in limiting Earnings Management than companies that do not implement Whistleblowing Policy. The study method used is descriptive-associative. The sample in this study was manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. This research results in findings that the Corporate Governance mechanism is more effective in companies that have a Whistleblowing Policy than companies that do not have a Whistleblowing Policy. The flow of information before the Whistleblowing Policy occurs a significant effect. Likewise, company size and leverage also have a substantial impact on Earnings Management. Meanwhile, there is no effect on the number of independent commissioners on Earnings Management.

Keywords: *Corporate Governance, Earnings Management, Whistleblowing Policy*

ABSTRAK

Mekanisme *Corporate Governance* tidak mampu memitigasi *Earnings Management* secara efektif. *Whistleblowing Policy* dapat berperan dalam melakukan tata kelola fungsional yang efektif sehingga diharapkan mampu mengurangi aktivitas *Earnings Management* secara signifikan. Studi ini bertujuan untuk menguji apakah mekanisme *Corporate Governance* di suatu perusahaan yang menerapkan *Whistleblowing Policy* lebih efektif dalam membatasi *Earnings Management* daripada perusahaan yang tidak menerapkan *Whistleblowing Policy*. Metode studi yang dipakai yakni deksriptif-asosiatif. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa mekanisme *Corporate Governance* lebih efektif di perusahaan yang memiliki *Whistleblowing Policy* daripada perusahaan yang tidak memiliki *Whistleblowing Policy*. Aliran informasi sebelum terjadi *Whistleblowing Policy* memiliki pengaruh signifikan. Demikian halnya dengan *size* dan *leverage* perusahaan yang juga berpengaruh signifikan terhadap *Earnings Management*. Sedangkan tidak terdapat pengaruh jumlah komisaris independen terhadap *Earnings Management*.

Kata Kunci: *Corporate Governance, Earnings Management, Whistleblowing Policy*

1 PENDAHULUAN

Skandal dan penipuan dalam praktik akuntansi kerap terjadi di era globalisasi. Fleksibilitas standar akuntansi memungkinkan pihak manajemen memanipulasi laba dalam batasan-batasan hukum yang berlaku. Praktik tersebut memaksa manajemen terlibat dalam pelaporan informasi akuntansi yang tidak akurat.

Berbagai fenomena pelaporan informasi akuntansi yang tidak akurat banyak terjadi di Indonesia. Misalnya kasus PT Jiwasraya sejak tahun 2008. Beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) berusaha menutupi kasus Jiwasraya tersebut, mulai dari KAP Soejatna, Mulyana dan Rekan (2006) hingga yang terbaru KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (2016-2017). Laporan yang diinformasikan KAP-KAP tersebut kepada publik yakni bahwa perusahaan dalam keadaan sehat. Informasi tersebut patut dicurigai, mengingat adanya unsur kecurangan dalam kasus Jiwasraya.

Sebelum Jiwasraya, masih terdapat kasus fraud di Asuransi Bumiputera yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Diduga modus yang digunakan sama, yakni bermain saham dengan berkolusi pada emiten yang sahamnya sulit diperdagangkan. Francis et al. (2008) dalam studinya mengemukakan bahwa perusahaan yang pengungkapan labanya baik akan cenderung menyediakan pengungkapan sukarela lebih tinggi daripada perusahaan yang labanya rendah.

Perhatian para peneliti terhadap *Earnings Management* telah beralih ke *Corporate Governance*. Mekanisme *Corporate Governance* meliputi Dewan Direksi, Kepemilikan dan Komite Audit disebut dapat mengurangi persoalan keagenan praktik *Earnings Management*. Akan tetapi pada implementasinya, mekanisme *Corporate Governance* tidak cukup kuat untuk mengurangi permasalahan agensi. Faktor yang

menyebabkan yakni adanya konflik kepentingan dalam manajemen dan asimetri informasi pada organisasi. Selain itu, adanya kesenjangan dalam mekanisme *Corporate Governance* dikarenakan banyak anggota dewan bekerja penuh waktu di perusahaan lain sehingga menggantungkan perolehan informasi pada CEO dalam memantau keputusan manajer.

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa *Corporate Governance* bukanlah mekanisme yang paling efektif dalam mengendalikan keputusan dalam perusahaan. Saat Dewan Direksi memiliki akses yang mudah terhadap informasi, mekanisme *Corporate Governance* secara efektif akan membatasi aktivitas *Earnings Management*. Oleh sebab itu, penting bagi Dewan untuk mencari informasi dari manajer tingkat bawah tentang keputusan dan kegiatan manajer puncak.

Guna mendukung hal tersebut, diperlukan kebijakan untuk mendukung dan memperkuat relasi antara mekanisme *Corporate Governance* dengan fungsi audit internal. *Whistleblowing Policy* diajukan sebagai bagian penting dari sistem kontrol internal untuk meningkatkan peran pemantauan mekanisme *Corporate Governance*. Studi-studi sebelumnya menghasilkan bahwa mekanisme *Corporate Governance* tidak mampu memitigasi *Earnings Management* secara efektif. *Whistleblowing Policy* dapat berperan dalam melakukan tata kelola fungsional yang efektif sehingga diharapkan mampu mengurangi aktivitas *Earnings Management* secara signifikan.

Studi ini bertujuan untuk menguji apakah mekanisme *Corporate Governance* di suatu perusahaan yang menerapkan *Whistleblowing Policy* lebih efektif dalam membatasi *Earnings Management* daripada perusahaan yang tidak menerapkan *Whistleblowing Policy*. Penelitian ini adalah studi empiris pertama yang mengimplementasikan teori agensi dan

sumber daya dalam dalam pengujian peran pemantauan *Corporate Governance* terhadap pembatasan *Earnings Management* melalui *Whistleblowing Policy*. Penelitian ini sebagai variabel intervening yang menggunakan objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

2 KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan membagi pengelolaan perusahaan yang berbentuk Perseoran Terbatas (PT) ke dalam pengelola dan pemilik. Pengelola kerap disebut manajemen atau agen, sedangkan pemilik atau pihak yang memegang saham disebut sebagai *principal*. Pembagian ini menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) saat perusahaan bangkrut. Problema tersebut muncul dalam dua permasalahan, yakni antara pemilik saham dengan pemilik obligasi dan antara pemilik saham dengan pihak manajemen (Husnan & Pudjiastuti, 2012).

Konflik antara manajer dengan pemegang saham terjadi saat manajemen tidak punya saham mayoritas. Antara keduanya berusaha meningkatkan kemakmuran masing-masing, pemilik saham memanfaatkan manajer namun manajer bertindak untuk mencapai kemakmurannya sendiri. Maka, pemilik saham harus mengeluarkan *agency cost* untuk memonitor kegiatan manajer (ukuran perusahaan), mencegah timbulnya pengeluaran tak perlu seperti utang dan pembelian aset.

Mengacu pada teori keagenan, mekanisme *Corporate Governance* mampu membantu menyelesaikan persoalan agensi. Selain itu, dari perspektif teori ketergantungan sumber daya (*resource dependence*), mekanisme *Corporate Governance* adalah alat strategis yang membantu untuk menghubungkan sumber daya eksternal ke perusahaan.

Whistleblowing

Mengacu pada pendapat Brandon (2013), *whistleblowing* ialah aksi yang dilaksanakan seorang pegawai atau beberapa pegawai dengan tujuan melakukan pembocoran atas pelanggaran yang umumnya terkait finansial oleh pimpinan atau perusahaan tempatnya bekerja, informasi tersebut dilaporkan kepada pihak lain. Saat mengungkapkan kecurangan atau *whistleblowing* kerap bersifat *confidential* dan harus dilakukan berdasarkan itidak baik, bukan semata untuk keuntungan pribadi (KNKG, 2008).

Brandon (2013) membagi *whistleblowing* ke dalam dua tipe, yakni internal dan eksternal. *Whistleblowing* internal dilakukan oleh karyawan dengan melaporkan tindak kecurangan ke atasan perusahaan yang ada di atasnya demi atas dasar motivasi moral dan mencegah kerugian perusahaan. *Whistleblowing* eksternal ditandai dengan pelaporan kecurangan perusahaan yang dilaksanakan pekerja kepada publik demi mencegah kerugian yang menimpa konsumen atau masyarakat.

Orang yang menginformasikan pelanggaran dalam organisasi atau *whistleblowing* disebut *whistleblower* (Muhammad, 2015). Namun, orang yang berani menjadi *whistleblower* tidaklah banyak disebabkan adanya risiko ancaman penurunan jabatan atau pemutusan hubungan kerja.

Whistleblowing System

Sistem *whistleblowing* atau *whistleblowing system* berwujud suatu aplikasi yang memiliki fungsi dalam memberikan laporan atas tindak pelanggaran. Antara perusahaan dengan pemerintah mempunyai *whistleblowing system* yang umumnya berbeda. Pada pemerintah, *whistleblowing system* diaplikasikan melalui WiSe sebagai laman situs resmi pemerintah. Pada perusahaan, aplikasi yang difungsikan telah dirancang

sedemikian rupa dengan kekhususan masing-masing sesuai kebutuhan *whistleblowing system* perusahaan.

Penyedia aplikasi *whistleblowing system* pada instansi pemerintahan adalah Kementerian Keuangan. Siapa saja yang mempunyai informasi yang hendak dilaporkan, misalnya informasi perihal tindakan berindikasi penipuan pada instansi pemerintah. Sedangkan acuan pelaporan dalam sektor swasta dijabarkan melalui Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2008. Pihak yang dituju saat *whistleblower* melaporkan tindak pelanggaran di sektor swasta bukan instansi khusus dalam penanganan laporan. Namun, perusahaan swasta wajib menerapkan sistem laporan yang memiliki spesialisasi tersendiri dan pengelolaannya diserahkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Whistleblowing system terdiri atas tiga elemen (Australian Standards 8000 dalam Daniri, 2007). *Pertama*, elemen struktural yakni komite organisasi khusus yang menangani *whistleblowing* sebagai usaha perlindungan kepada *whistleblower* sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Kedua*, elemen operasional yakni sistem pengkomunikasian laporan yang aman, kerahasiaan terjamin, dan cepat, serta pengaksesannya mudah dilakukan oleh siapa saja. *Ketiga*, elemen *maintenance* yakni pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan investigator.

Adapun mekanisme dalam *whistleblowing system* melalui tahapan *intake* atau pelaporan, *retention* atau pencatatan pelaporan, dan *treatment* atau pemrosesan laporan (Bloch dalam Daniri, 2007). Pada tahap pemrosesan, terdapat proses *communication*, *evaluation*, *investigation*, *report*, dan *coorrective action*.

Amri (2008) menyebutkan bahwa sistem *whistleblowing* bisa dinyatakan memiliki efektivitas jika mampu meminimalisasi banyaknya kecurangan usai

penerapan program sistem *whistleblowing* dalam kurun periode tertentu. Efektivitas diterapkannya *whistleblowing system* bergantung pada tiga hal, antara lain (1) Situasi yang memungkinkan pekerja mengetahui atau menyaksikan tindak curang dan bersedia melakukan pelaporan; (2) Perusahaan dalam bersikap terkait balasan yang bisa saja dihadapi pelapor usai melaporkan, dan (3) Probabilitas pembocoran informasi pelaporan kecurangan ke pihak eksternal perusahaan.

Efektivitas Mekanisme *Corporate Governance* pada Perusahaan yang Memiliki *Whistleblowing Policy*

Pengaduan yang diidentifikasi tidak hanya berkaitan langsung dengan penipuan, melainkan juga *Earnings Management*. Sehingga *Whistleblowing Policy* merupakan mekanisme yang efektif untuk mengurangi *Earnings Management*. Tanpa *Whistleblowing Policy*, manajemen dapat menyembunyikan praktik *Earnings Management* dan menyesatkan informasi keuangan pada pemegang saham.

Banyak penipuan perusahaan terungkap tidak hanya oleh auditor atau analis eksternal, tetapi juga oleh karyawan yang memiliki akses informasi akuntansi. Oleh karena itu, *Whistleblowing Policy*, sebagai salah satu mekanisme *Corporate Governance*, dapat meningkatkan aliran informasi ke direksi, khususnya, direksi independen, dan dengan demikian membantu mereka mendeteksi *Earnings Management*.

Oleh karena itu, dengan adanya *Whistleblowing Policy* yang efektif, auditor eksternal dan internal, antara lain, akan dengan mudah berkomunikasi dan mengangkat masalah apa pun yang terkait dengan kualitas pelaporan keuangan kepada direktur atau pemangku kepentingan lainnya, terutama tentang keterlibatan manajer dalam kegiatan *Earnings Management*. Dengan demikian, dengan adanya *Whistleblowing Policy* yang efektif,

mekanisme *Corporate Governance* akan lebih efektif dalam mendeteksi praktik *Earnings Management*. Oleh karena itu, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H1: Mekanisme *Corporate Governance* lebih efektif di perusahaan yang memiliki *Whistleblowing Policy* daripada perusahaan yang tidak memiliki *Whistleblowing Policy*

3 METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Studi ini menerapkan desain studi deskriptif-asosiatif untuk menggambarkan karakteristik dan mengidentifikasi kausalitas antarvariabel.

Populasi dan Sampel

Populasi dari studi ini adalah perusahaan manufaktur yang mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2018 yang mana terdapat 435 perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI.

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Metode *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini, yakni berkriteria perusahaan dengan pendapatan negatif dalam satu tahun atau lebih dikeluarkan dari sampel.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai pada studi ini ialah pengumpulan data sekunder, yang dihimpun dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga IDX Statistik, *website* BEI yaitu www.idx.co.id. Sumber-sumber data yang difungsikan adalah laporan finansial tahunan perusahaan sampel. Dalam penelitian ini penulis dapat meninjau laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan dari tahun 2016-2018.

Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel didefinisikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran
DA	Nilai absolut DA menggunakan MJM
BCIND	“1” jika ketua dewan independen, “0” sebaliknya
BCTEN	Jumlah tahun ketua dewan bekerja di dewan direksi
BSIZE	Jumlah dewan direksi
BMEET	Jumlah rapat dewan per tahun
BIND	Proporsi independensi dewan(persenan)
BFEM	“1” jika dewan memiliki direktur wanita, “0” sebaliknya
ACSIZE	Jumlah anggota <i>Audit Committee</i>
ACMEET	Jumlah pertemuan <i>Audit Committee</i> per tahun
ACIND	Proporsi independensi <i>Audit Committee</i>
ACFEM	“1” dari <i>Audit Committee</i> memiliki direktur wanita, “0” sebaliknya
ACAE	Proporsi <i>Audit Committee</i> dengan keahlian akuntansi (persenan)
ACMD	Jumlah anggota <i>Audit Committee</i> yang merupakan direktur di perusahaan lain
Conc5	Proporsi saham dipegang oleh lima pemegang saham terbesar(persenan)
Big4	“1” jika perusahaan diaudit oleh Big 4, “0” sebaliknya
FSIZE	Log alami dari total asset
LEV	Total utang terhadap total asset
ROA	Penghasilan bersih / total asset
NCFO	“1” jika perusahaan memiliki nilai tunai negatif dari operasi, “0” sebaliknya

Sumber: Data Diolah, 2020

Teknik Analisis Data

Analisis diterapkan secara deskriptif dan induktif. Model analisis yakni regresi data panel, ialah melalui pengkombinasian jenis data *time-series* dan *cross-section* (Ghozali & Ratmono, 2013).

Pada analisis data panel, pengujian diujikan melalui:

1. Uji Chow atau Likelyhood digunakan untuk pemilihan antara model *fixed effect* dan *common effect*.
2. Uji Hausman dipakai guna memilih model yang paling tepat untuk diimplementasikan, apakah *fixed effect* atau *random effect*.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang diterapkan meliputi pengujian normalitas. Implementasi uji normalitas residual yang difungsikan ialah uji Jarque–Bera (JB). Fungsi uji JB yakni dalam rangka menguji penyebaran normal data bagi sampel besar (*asymptotic*). Pengecekan penyebaran data secara normalitas dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu pertama, ketika nilai Jarque-Bera <2, hal ini mengindikasikan data telah tersebar secara normal. Kedua, dengan $\alpha = 5\%$, ketika data sig >0,05 dengan demikian data berdistribusi normal, sebaliknya ketika sig <0,05 mengandung arti data tidak terdistribusi dengan normal.

Uji Model

Data yang sudah dihimpun selanjutnya diproses pengolahannya memanfaatkan *software Eviews 8*. Agar diketahui pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat dipakai model regresi linear berganda atas dasar persamaan sebagai berikut:

$$DA = \alpha + \beta_1 BCIND + \beta_2 BCTEN + \beta_3 BSIZE + \beta_4 BMEET + \beta_5 BIND + \beta_6 BFEM + \beta_7 ACSIZE + \beta_8 ACMEET + \beta_9 ACIND + \beta_{10} ACFEM + \beta_{11} ACAE + \beta_{12} ACMD + \beta_{13} Conc5 + \beta_{14} Big4 + \beta_{15} FSIZE + \beta_{16} LEV + \beta_{17} ROA + \beta_{18} NCFO + e.$$

Keterangan

DA	= <i>Discretionary accrual</i>
BCIND	= ketua dewan independen
BCTEN	= tahun ketua dewan bekerja di dewan direksi
BSIZE	= dewan direksi
BMEET	= rapat dewan per tahun
BIND	= Proporsi independensi dewan(persenan)

BFEM	= dewan yang memiliki direktur wanita
ACSIZE	= anggota <i>Audit Committee</i>
ACMEET	= pertemuan <i>Audit Committee</i> per tahun
ACIND	= Proporsi independensi <i>Audit Committee</i>
ACFEM	= <i>Audit Committee</i> yang memiliki direktur wanita
ACAE	= Proporsi <i>Audit Committee</i> dengan keahlian akuntansi
ACMD	= anggota <i>Audit Committee</i> yang juga direktur di perusahaan lain
Conc5	= Proporsi saham dipegang oleh lima pemegang saham terbesar
Big4	= perusahaan yang juga diaudit oleh Big 4
FSIZE	= total asset
LEV	= Total utang terhadap total asset
ROA	= Penghasilan bersih dibagi total asset
NCFO	= perusahaan yang memiliki nilai tunai negatif dari operasi

Uji Statistik F juga dilaksanakan guna melakukan pengujian apakah model regresi bisa diterapkan dalam rangka menaksir besarnya belanja modal. Koefisien Determinasi (R^2) difungsikan sebagai pengukuran seberapa jauh kapasitas variabel-variabel independen memberikan penjelasan atas variabel dependen.

Pengujian hipotesis dilaksanakan memakai distribusi t. Uji statistik untuk membuktikan pengujian apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik jika terpisah. Kriteria pengujian hipotesis dengan uji t adalah:

1. Prob < 0,05 maka variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Prob > 0,05 maka variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Analisis Deskriptif

	N	Mean	Max	Min	Std. Deviasi
ACAE	231	41441.36	86976.00	24343.00	12131.35
ACFEM	231	38904.5	1	0	0.26529
ACIND	231	0.469211	0	1	0.39101
ACMD	231	0.342219	1	0	0.39162
ACMEET	231	25.17734	1	0	1.109881
ACSIZE	231	0.078122	0	0	0.130132
BCIND	231	61689.00	0	0	22291.01
BCTEN	231	51427.00	0	0	20131.00
BFEM	231	68910.07	0	1	329171.00
BIG4	231	21.8787	0	1	391072.11
BIND	231	39029.00	0	1	201211.21
BMEET	231	12.78142	19	10	2.1891170
BSIZE	231	5.789110	10	9	2.18911
CONC5	231	45188.00	86976.00	23253.00	11190.60
DA	231	20.56199	454.7784	564.7014	32.16101
LEV	231	8.34229	1	0	1.551911
FSZE	231	21.77912	27.52697	21.96393	1.134180
NCFO	231	0	1	0	0.201853
ROA	231	0.234336	0.898680	0.001326	0.1178192

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2 jumlah audit komite memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 41441.36, maximum sebesar 86976.00, dan minimum senilai 24343.00. Besarnya nilai mean *corporate risk* yang

menjadi sampel dalam penelitian adalah 0.389045, nilai maksimalnya yaitu 1 dan nilai minimumnya senilai 0. Besarnya nilai mean kompensasi rugi fiskal adalah 0.434409, nilai maksimum yaitu 1, dan nilai minimum yaitu 0. Besarnya nilai mean dari *leverage* senilai 0.488911, nilai maksimumnya sebesar 5.488513, dan nilai minimumnya sebesar 0.000103. Besarnya nilai mean ukuran perusahaan (*size*) yang pengukurannya menggunakan *logaritma natural* sebesar 28.14234, nilai maksimalnya sebesar 32.15098, dan memiliki nilai minimumnya sebesar 18.68498. Nilai mean dari *return on asset* adalah senilai 0.089403, nilai maksimumnya senilai 1.032874, serta nilai minimumnya senilai 0.000431.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

Series: Standardized Residuals Sample 2016 2018 Observations 234	
Jarque-Bera	260.4127
Probability	0.00000

Sumber: Data Diolah, 2020

Merujuk pada Tabel 3 dapat ditinjau bahwa residual data tidak berdistribusi berdasarkan normalitas sebab nilai Jarque-Bera 260.4127 melebihi 2 dan nilai probabilitasnya 0.00000 < 0.05. Pada studi ini jumlah observasi 231, yakni sebanyak 77 perusahaan dikali 3 tahun. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Gujarati (2007) yaitu studi ini mengandung set data yang melebihi standar yaitu 30 data, maka asumsi normalitas tidak terlalu dipermasalahkan.

Hasil Uji Kelayakan Estimasi Regresi Data Panel

1. Hasil Uji *Chow Test*

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed

Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.566 900	-55,560	0.000
Cross-section Chi-square	77.27 116	81	0.000

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 4 dapat ditinjau bahwa besarnya Prob. *Cross-section* F senilai 0,0000, nilai tersebut memperlihatkan nilai <0,05 (tingkat signifikansi studi ini). Mengacu pada hasil Uji Chow ditarik konklusi bahwa di antara metode *common effect* dan *fixed effect*, maka metode yang paling tepat untuk diterapkan yakni metode *fixed effect*.

Model *fixed effect* lebih tepat dipakai pada penelitian ini, namun disebabkan pada data panel masih adanya satu metode pendekatan lainnya yakni *random effect*, dengan demikian perlu dikomparasikan antara dua metode tersebut. Hasil mengkomparasikan dua metode tersebut ialah agar ditemukan metode paling tepat dalam melakukan estimasi data panel pada studi ini. Dalam rangka melakukan perbandingan dua metode tersebut maka difungsikan Uji Hausman.

2. Uji Hausman Test

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects – Hausman test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.523188	5	0.0049

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 5 merupakan tabel uji hausman yang menunjukkan probabilitas *chi-square* lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan (0.0049 < nilai sig. α 0,05) sehingga antara *fixed effect* dan *random effect*, model yang efisien

digunakan pada penelitian ini adalah *fixed effect model*.

Hasil Analisis Data Panel

Metode yang terpilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect*. Hasil Regresi *Fixed Effect* dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Regresi *Fixed Effect*

Dependent Variable: Corporate Governance				
Method: Panel Least Squares				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-41344.1	25693.26	1.172734	0.2422
BCIND	6015.313	5162.044	1.88161	0.0612
BCTEN	0.029728	0.06758	0.227396	0.8203
BSIZE	-4492.13	5300.81	-2.90762	0.004
BMEET	-72.6871	1042.425	-1.78216	0.0761
BFEM	515.9556	585.921	1.440994	0.151
BIG4	4658.054	2900.182	1.615367	0.1077
ACSIZE	-419.112	565.6026	0.390608	0.6965
ACMEET	-4271.5	2574.519	-1.7656	0.0789
ACIND	1727.541	5691.928	1.963299	0.0509
ACFEM	0.058265	0.055856	-0.08731	0.9305
ACAE	360.9378	484.7547	-0.98511	0.3257
CONC5	-896.711	670.138	-1.24233	0.2155
FSIZE	0.17272	0.074668	2.574775	0.0107
LEV	2.83E+03	8.86E+02	1.549112	0.1228
ROA	3.77E-09	2.99E-09	0.891997	0.3734
NCFO	-1219.45	4773.386	-2.02041	0.0446
R-squared	0.567852	Mean dependent var		42462.35
Adjusted R-squared	0.265033	S.D. dependent var		13110.35
F-statistic	11239.53	Durbin-Watson stat		21.78598
Prob(F-statistic)	0.00049	S.E. of regression		23.21832
Sum squared resid	1.73E+10	Akaike info criterion		22.3635

Sumber: Data Diolah, 2020

Merujuk pada hasil kalkulasi analisis rasio pada *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tiga tahun (2016-2018) maka dilakukan pengujian hipotesis dengan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel 6 maka menunjukkan besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,56852 yang

berarti yang berarti delapan belas variabel independen mampu menjelaskan 56.78% sedangkan sisanya 65.43 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil analisis terhadap nilai F statistic menunjukkan sebesar 0.795986 dengan probabilitas 0.00057. Karena probabilitas jauh di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kedelapan belas variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *Earnings Management*.

Sebelum terjadi *Whistleblowing Policy*, dapat dilihat hasil regresi *fixed effect* seperti berikut.

Tabel 7. Hasil Regresi *Fixed Effect* Sebelum *Whistleblowing Policy*

Dependent Variable: <i>Corporate Governance</i> Method: Panel Least Squares				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-41344.1	25693.26	-1.60914	0.1099
ACFEM	6015.313	5162.044	1.165297	0.2459
ACIND	0.029728	0.06758	0.439889	0.6607
ACMD	-4492.13	5300.81	-0.84744	0.3982
ACMEET	-72.6871	1042.425	-0.06973	0.9445
ACSIZE	515.9556	585.921	0.880589	0.3801
BCIND	4658.054	2900.182	1.606125	0.1105
BCTEN	-419.112	565.6026	-0.741	0.46
BFEM	-4271.5	2574.519	-1.65914	0.0994
BIG4	1727.541	5691.928	0.303507	0.762
BIND	0.058265	0.055856	1.04313	0.2987
BMEET	360.9378	484.7547	0.744578	0.4578
BSIZE	-896.711	670.138	-1.3381	0.1831
CONC5	0.17272	0.074668	2.313153	0.0222
FSIZE	2.83E+03	8.86E+02	3.187546	0.0018
LEV	3.77E-09	2.99E-09	1.259655	0.2099
NCFO	-1219.45	4773.386	-0.25547	0.7987
R-squared	0.567852	Mean dependent var		42462.35
Adjusted R-squared	0.265033	S.D. dependent var		13110.35
F-statistic	1.875218	Durbin-Watson stat		2.691259
Prob(F-statistic)	0.000364	S.E. of regression		11239.53
Sum squared resid	17300000	Akaike info criterion		21.78598

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio pada *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tiga tahun (2016-2018) maka dilakukan pengujian hipotesis dengan hasil analisis regresi sebelum WHBLT yang disajikan pada tabel 7 maka menunjukkan besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,567852 yang berarti yang berarti delapan belas variabel independen mampu menjelaskan 56.78% sedangkan sisanya 43.22 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil analisis terhadap nilai F statistik menunjukkan sebesar 1.875218 dengan probabilitas 0.00037. Karena probabilitas jauh di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kedelapan belas variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *Earnings Management*.

Hubungan *Corporate Governance* dengan *Earnings Management*

Whistleblowing Policy memiliki peran yang penting terhadap *Earnings Management* karena dengan adanya *Whistleblowing Policy* dapat memberikan meningkatkan aliran informasi ke direksi, khususnya, direksi independen, dan dengan demikian membantu mereka mendeteksi adanya *Earnings Management*.

Sebelum dimasukkan, dari penelitian ini sebelum terjadinya *Whistleblowing Policy* memiliki nilai yang berpengaruh positif dengan *Earnings Management* 0,567852 yang berarti delapan belas variabel independen mampu menjelaskan 56.78% sedangkan sisanya 43.22 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dan dengan probabilitas 0.00037. Karena probabilitas jauh di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kedelapan belas variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *Earnings Management*. Hal ini berarti aliran informasi sebelum terjadi

Whistleblowing Policy memiliki pengaruh yang signifikan.

Setelah dimasukkan, dari penelitian ini sebelum terjadinya *Whistleblowing Policy* memiliki nilai yang berpengaruh positif dengan *Earnings Management* 0,34576 yang berarti delapan belas variabel independen mampu menjelaskan 34.57% sedangkan sisanya 65.43% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil analisis terhadap nilai F statistik menunjukkan sebesar 0.795986 dengan probabilitas 0.00057. Karena probabilitas jauh di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kedelapan belas variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *Earnings Management*. Hal ini berarti aliran informasi sebelum terjadi *Whistleblowing Policy* memiliki pengaruh yang signifikan.

Hubungan Kepemilikan Institusional dan Ukuran Komisaris sebagai Variabel Intervening dengan *Earnings Management*

Kepemilikan institusional dan Ukuran Komisaris ialah banyaknya dewan komisaris pada suatu badan usaha yang berperan melakukan pengawasan dan menasihati dewan direksi, juga memiliki tanggung jawab agar penerapan *good corporate governance* sungguh-sungguh dilaksanakan, akan tetapi tidak memberikan pengaruh pada *Earnings Management*. Jumlah komisaris independen mempunyai tingkat signifikansi $>0,05$ yaitu 0.7713 yang artinya tidak terdapat pengaruh jumlah komisaris independen terhadap *Earnings Management*.

Hubungan Size sebagai Variabel Kontrol dengan *Earnings Management*

Berdasarkan hasil penelitian, variabel *Size* berhubungan positif dan signifikan terhadap *Earnings Management* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00046. Hal tersebut mengandung arti bahwa kian besar

ukuran perusahaan, maka tingkat *Earnings Management* akan berkurang. Karena semakin besarnya ukuran perusahaan, kerap informasi yang disediakan untuk pemegang investasi sebagai landasan mengambil keputusan juga kian besar, dengan demikian probabilitas terjadinya asimetri informasi yang mampu memungkinkan praktik *Earnings Management* di perusahaan semakin kecil.

Hubungan Leverage sebagai Variabel Kontrol dengan *Earnings Management*

Studi ini menghasilkan temuan yang serupa sebagaimana diselenggarakan oleh Widyaningdyah (2001) yakni menemukan bahwa *leverage* membawa dampak signifikan terhadap *Earnings Management*. Hal ini disebabkan tingginya rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan dikarenakan tingginya besaran utang daripada kepemilikan aktiva perusahaan, sehingga dugaan praktik *Earnings Management* dilontarkan pada perusahaan dengan ancaman *default* atau tidak mampu perusahaan memenuhi kewajiban pelunasan utang sebagaimana jatuh tempo yang ditentukan.

Perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur dijelaskan dalam tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Perbedaan antara Perusahaan Jasa dan Perusahaan Manufaktur

Perusahaan Jasa	Perusahaan Manufaktur
1. <i>Earnings Management</i> memiliki nilai positif yang variabel-variabelnya lebih banyak berpengaruh banyak yaitu 56.78%	1. <i>Earnings Management</i> memiliki nilai positif yang variabel-variabelnya lebih berpengaruh hanya 34.5 %
2. Memiliki nilai F statistic 0.49 lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan manufaktur	2. Memiliki nilai F statistic 0.55 lebih besar dibandingkan dengan perusahaan jasa
3. Jumlah perusahaan lebih banyak yaitu 77 perusahaan	3. Jumlah perusahaan lebih sedikit yaitu 71 perusahaan

5. KESIMPULAN

Konklusi yang dihasilkan dari hasil analisis studi ini yakni mekanisme *Corporate Governance* lebih efektif diterapkan di perusahaan yang memiliki *Whistleblowing Policy* daripada perusahaan yang tidak memiliki *Whistleblowing Policy*. Aliran informasi sebelum diterapkannya *Whistleblowing Policy* memiliki pengaruh signifikan. *Whistleblowing Policy* memiliki peran yang penting terhadap *Earnings Management* karena dengan adanya *Whistleblowing Policy* dapat memberikan meningkatkan aliran informasi ke direksi, khususnya, direksi independen, dan dengan demikian membantu mereka mendeteksi adanya *Earnings Management*. Demikian halnya dengan *size* dan *leverage* perusahaan yang juga berpengaruh signifikan terhadap *Earnings Management*. Sedangkan tidak terdapat pengaruh jumlah komisaris independen terhadap *Earnings Management*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, G. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblower System - WSB)*.
- Brandon, J. R. (2013). *Whistle-blowing (I)*. Cambridge University Press.
- Daniri, A. (2007). *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bisnis Indonesia.
- Francis, J., Nanda, D., & Olsson, P. (2008). Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital. *Journal of Accounting Research*, 46(1), 53–99.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- KNKG. (2008). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2(22), 203–222.